

**ANALISIS KETERKAITAN FUNGSIONAL WILAYAH DAN SEKTORAL
PERBATASAN JAWA TENGAH – JAWA TIMUR:
IMPLEMENTASINYA DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH**
*(Analysis on Relation Between Regional and Sectoral Using Functional Development
System Central Java – East Java Border On the Implementation of Cooperative
Development Area)*

C. Utomo, Mursid Zuhri
Balitbang Provinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

Incomplete understanding of regional autonomy often results in mis perception of local governments to interpret the implementation of regional autonomy. Sectoral and regional ego often becomes something quite disturbing in the implementation of regional autonomy. Conditions that would inevitably lead to inefficiency pengelolaan local governments as well as less harmonious relationships among local governments. Sectoral issues, externalities autonomous region, the function of interdependence among regions and the hierarchy of public goods is a fundamental issue underlying the need for regional development and sectoral cooperation. Cooperation among local governments (districts) in one province / provinces into things that must be encouraged. The success and achievements of the cooperation is dependent upon the ability of local governments held a joint development level of development in their regions. Nevertheless, private and public participation should also be examined and optimized. Along dengan konsep good governance, networking cooperation among the three actors will greatly determine the quality / success of the implementation of regional autonomy. From the study occurred pattern that emerged from the realization of cooperation with local governments to improve the welfare of society is relatively high compared to other regions. The issue of public services and use of natural resources together into a central area of cooperation.

Several constraints found in this study on the implementation of cooperation among local governments is still have a diversity of interests and priority areas / sectors of cooperation, still the size dependence to the central government, budgeting issues, and the legality of the law as an umbrella partnership. Therefore, the things to note for sustaining efektivitas and sustainability of cooperation among districts is to form a strong partnership base. Monitoring the potential, constraints and sectoral cooperation and daerah. Menyusun schemes to be published in order to strengthen the target group and increase the knowledge of stakeholders on the importance of such cooperation.

Keywords: *identification of sectoral and functional, determinant, the model of cooperation and sectoral areas.*

PENDAHULUAN

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesungguhnya adalah pengembangan semangat demokrasi, peningkatan peran serta pemberdayaan

masyarakat, dan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian landasan filosofi yang menjadi dasar lahirnya UU Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah.

Kenyataannya menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah ternyata telah dipersepsikan dan disikapi secara variatif oleh beberapa pemerintah daerah, misalnya mereka mempersepsikan otonomi daerah sebagai momentum untuk memenuhi keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang berkepentingan. Dari pelaksanaan di lapangan, muncul berbagai persoalan yang cenderung kompleks dan multidimensional. Berbagai kalangan telah memprediksi akan terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan pengkotak-kotakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi pengelolaan pemerintahan daerah kemudian hubungan serasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terpelihara. Munculnya gejala-gejala negative tersebut diatas patut mendapatkan perhatian serius karena cepat atau lambat mempengaruhi disintegrasi bangsa. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintahan yang lain patut mendapatkan perhatian serius. Bagaimanapun hubungan antara mereka merupakan perekat sosial yang menentukan ketahanan nasional. Karena itu isu-isu tersebut mesti diletakkan dalam kerangka kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral dan dikaji secara mendalam. Pertimbangannya adalah, *pertama*, pembangunan di masa lalu sarat dengan sentralisasi, semua otoritas pembangunan berada di tangan dan diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. *Kedua*, disadari bahwa kelembagaan

kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral memiliki urgensi penting, tetapi kerjasama tersebut sebenarnya belum memiliki format ideal. *Ketiga*, tidak jelasnya arah kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral dapat menjadi ancaman nyata terhadap masa depan integrasi nasional dan prospek otonomi daerah. Mengacu pada ketiga pertimbangan tersebut, perlu dianalisis pola atau model kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi isu dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan wilayah dan sektoral dan fungsional, di era otonomi daerah dan desentralisasi, serta menginventarisasi pola/model kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral yang sudah berjalan antar wilayah. Mengidentifikasi faktor-faktorpenentu (determinant) dan menentukan prioritas dalam pengembangan kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral, merumuskan beberapa rekomendasi strategis dan alternatif pola/model kerjasama wilayah dan sektoral yang ideal, sejalan dengan paradigma desentralisasi atau otonomi daerah.

BAHAN DAN METODA

Tipe penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian yang mempelajari kasus secara mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan metode survey dan pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (Focus group discussion/FGD). Responden penelitian 70 orang terdiri 6 orang pemangku kepentingan pada Kabupaten dan 4 orang tokoh masyarakat dari 7 Kabupaten perbatasan. penelitian ini dilaksanakan 8 bulan, mulai April sampai dengan bulan Juni 2008, mengambil lokasi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen,

Magetan, Ngawi, Ponorogo, Blora, Tuban dan Bojonegoro.

Data yang dikumpulkan yaitu bidang-bidang pembangunan dan indikatornya sebagai berikut:

Tabel 1 Bidang-Bidang dan Indikator Kerjasama Wilayah Perbatasan

Bidang Ekonomi	Indikator-Indikator
1. Ekonomi	a. arus barang komoditi input dan barang jadi b. arus modal c. hubungan produksi d. pola konsumsi/pendapatan
2. Fisik	a. jaringan-jaringan transportasi b. prasarana pelayanan umum c. ketergantungan ekologis
3. Sosial Budaya a. Gerakan / mobilitas penduduk b. Interaksi sosial/budaya c. Politik dan administrasi	a. migrasi sementara dan tetap b. migrasi sikuler a. Interaksi group sosial a. Arus anggaran pemerintah b. Pola-pola otoritas, perijinan, supervisi, pengawasan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Tengah – Jawa Timur

Berdasarkan hasil pra survey tersebut kemudian menetapkan wilayah-wilayah kecamatan sampel dari dua wilayah administratif yang berbatasan. Yang menjadi pertimbangan dalam penentuan kecamatan sampel adalah kecamatan-kecamatan berbatasan dimungkinkan terjadi hubungan

fungsional wilayah, dengan memperhatikan pola interaksi ekonomi antar wilayah (arus barang dan arus orang) serta ketersediaan sarana jalan dan transportasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan kecamatan terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Lokasi Penelitian Wilayah Perbatasan Jawa Tengah – Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Jawa Timur	
Kabupaten terpilih	Kecamatan terpilih	Kecamatan terpilih	Kabupaten terpilih
Wonogiri	Baturetno	Punung	Pacitan
Wonogiri	Purwantoro	Badegan	Ponorogo
Wonogiri	Bulukerto	Poncol	Magetan
Sragen	Sambungmacan	Mantingan	Ngawi
Sragen	Gondang	Sine	Ngawi
Blora	Cepu	Padangan	Bojonegoro
Blora	Kradenan	Ngraho	Bojonegoro
Rembang	Sale	Jatirogo	Tuban
Rembang	Sarang	Bulu	Tuban

Sumber : data primer diolah

Sedangkan kecamatan-kecamatan perbatasan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, diabaikan, walaupun demikian selama penelitian keterkaitan dengan kecamatan lain tetap diperhatikan. Variabel penelitian ini adalah tingkat hubungan fungsional wilayah dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- Ekonomi Ruang (Spatial Economic) yang dilihat dari sektor ekonomi pertanian industri dan jasa) yang saling terkait.
- Pola hubungan produksi dalam spatial linkage daerah perbatasan yang

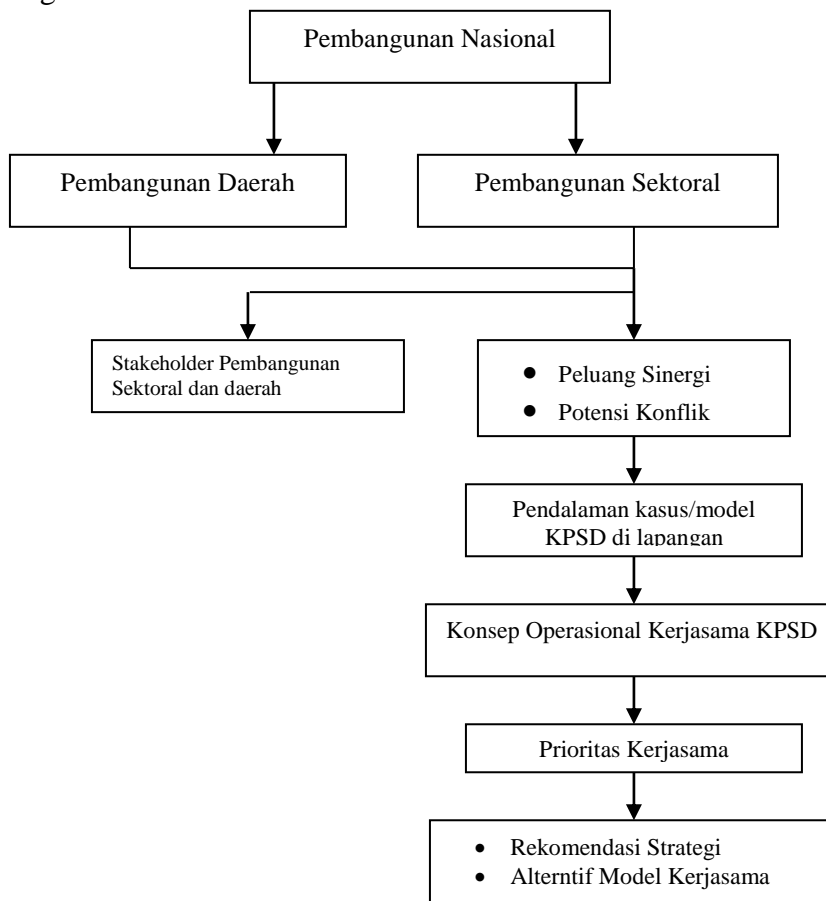
dilihat dari keterkaitan antara masukan – keluaran

- Potensi-potensi fisik dan prasarana (jaringan jalan, transportasi ketergantungan ekologis.

Teknik pengumpulan data, data primer dengan cara triangulasi, yaitu (1) interview guide, (2) studi documenter, dan (3) pengamatan.

Teknik analisa data menggunakan analisa deskriptif, dengan memperhatikan spatial linkage pada wilayah perbatasan.

Kerangka Pikir:



Gambar 1 : Alur pikir Keterkaitan Fungsional Wilayah perbatasan Jawa Tengah – Jawa Timur

HASIL

Terdapat beberapa pola kerjasama yaitu: Pola kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral berupa kerjasama antar

wilayah terjadi hubungan fungsional, Kerjasama Antar Wilayah Berpotensi Terjadi Hubungan Fungsional, Wilayah-wilayah yang tidak terjadi hubungan

fungsional, wilayah-wilayah terabaikan, perilaku dan motivasi kerjasama dan potensi yang memungkinkan untuk dijadikan sarana kerjasama seperti keterlibatan pihak swasta, kesadaran untuk saling bekerjasama, Inisiator Kerjasama Wilayah dan Sektoral dan kendala yang mungkin muncul.

PEMBAHASAN

A. Pola Kerjasama Pembangunan Wilayah dan Sektoral

1. Kerjasama antar wilayah terjadi hubungan fungsional

Selain kerjasama yang melibatkan beragam sektoral dan *stakeholder* pada suatu wilayah, bentuk kerjasama yang lain adalah kerjasama antar wilayah. Kerjasama ini baik untuk suatu sektor tertentu atau lebih, dengan melibatkan hanya pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan atau melibatkan stakeholder non pemerintah, yaitu pihak swasta/perusahaan dan masyarakat.

1.1. Pengembangan Kawasan Pawonsari

Kerjasama yang melibatkan beberapa wilayah, beragam sektor, juga melibatkan pihak swasta adalah proyek pengembangan kawasan segitiga Pawonsari yang meliputi beberapa simpul pusat pertumbuhan, melibatkan Pemda dari tiga Kabupaten dan dari tiga Propinsi berbeda, yaitu Kabupaten Pacitan (Jawa Timur). Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul D.I.Y). Kerjasama ini ditujukan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut, dengan menggali dan memanfaatkan potensi wilayah, khususnya sektor strategis. Kerjasama antar tiga pemerintah daerah kabupaten ini telah berjalan cukup lama, berupa rapat koordinasi dan pembuatan rencana kerja. Pada gilirannya, proyek ini akan dikembangkan dengan mengajak pihak swasta untuk merealisasikan dan mengembangkan

rencana yang telah disepakati bersama – salah satu rencana besarnya adalah mengelola dan mengembangkan kawasan Pawonsari, selain beberapa rencana pembangunan infrastruktur penunjang jalan berupa jalur Jawa Selatan. Sementara itu pola hubungan fungsional wilayah dilihat dari aktifitas wilayah dan sektoral, dapat dikatakan bahwa Baturetno berfungsi sebagai pusat (nodal) bagi daerah perbatasan Pacitan yaitu kecamatan Punung Kabupaten Pacitan..Sektor-sektor ekonomi yang membentuk hubungan wilayah fungsional adalah sektor perdagangan dan industri. Wilayah Baturetno merupakan pintu masuk bagi Pacitan, sehingga pariwisata di Pacitan didukung juga dari wonogiri. Sebagian besar pengusaha sektor jasa angkutan berasal dari Kabupaten Wonogiri, Kota Solo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sisanya dari Pacitan.

Implikasi bentuk hubungan fungsional wilayah seperti ini adalah menjadikan Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri merupakan titik tumbuh dari Kecamatan Perbatasan Wonogiri (Jawa Tengah) dan Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) merupakan titik tumbuh dari Kecamatan perbatasan Pacitan, kedua kecamatan dapat dibentuk kerjasama suatu “pengembangan wilayah fungsional”. Dengan pendekatan ini diharapkan perbatasan tersebut lebih cepat berkembang. Mengingat wilayah tersebut mempunyai potensi untuk berkembang, apabila didukung infrastruktur bersama dari dua wilayah kecamatan yang berbeda secara administratif tersebut, dengan tetap memperhatikan pembangunan yang dilandasi oleh pewilayahan fakta-fakta. Wilayah fakta itulah yang menentukan persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat yang

selanjutnya akan menentukan kebutuhan anggota masyarakat.

Banyak potensi sosial ekonomi yang ada di daerah Kecamatan Punung (Jawa Timur) dan Baturetno (Jawa Tengah) yang dapat dikerjasamakan sehingga menjadi kekuatan wilayah yang bersangkutan.

2. Kerjasama Purwanto, Wonogiri (Jateng) – Badegan, Ponorogo (Jawa Timur).

Pola hubungan fungsional antar perbatasan Purwanto – Badegan terjadi dalam sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor industri kecil.

Di sektor perdagangan para pedagang dari Kecamatan Purwanto kebanyakan memperoleh barang-barang dagangan dari Solo, Kota Wonogiri serta dari Kabupaten Ponorogo. Dalam konteks ini Ponorogo sebagai pemasok barang-barang dagangan kebutuhan sehari-hari, meliputi barang-barang kelontong, hasil bumi, bahan bangunan, alat-alat elektronik, mebelair.

Sektor pertanian, petani Purwanto, sebagian memperoleh pupuk, obat-obatan dan bibit dari Kecamatan Badegan. Sebaliknya Kecamatan Baturetno menjual sebagian produksinya ke Ponorogo. Barang-barang yang dijual ke Ponorogo antara lain kedelai, mete.

Di sektor industri kecil, dari Purwanto sebagian dipasarkan ke Solo dalam bentuk batu mulia, keramik dan mete, Yogyakarta (batumulia) dan Ponorogo yaitu emping melinjo, batu bata).

Sedangkan yang dipasarkan di daerah setempat adalah mebel, genteng, tegel dan batu bata)... Sebaliknya Wonogiri harus membeli bahan baku industri tegel dari Ponorogo dalam bentuk semen dan pasir. Implikasi bentuk hubungan kedua wilayah ini adalah Kecamatan Purwanto merupakan titik

tumbuh dari kecamatan perbatasan Wonogiri Jawa Tengah dan Kecamatan Badegan merupakan titik tumbuh Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Secara ekonomis lebih baik bila kedua kecamatan tersebut dibentuk kerjasama pembangunan wilayah fungsional. Sejalan dengan pemikiran tersebut, sebenarnya banyak potensi sosial ekonomi yang dapat dikerjasamakan sehingga menjadi kekuatan wilayah yang bersangkutan. Mengingat pola penggunaan tanah dengan luas lahan dari tanah sawah yang beririgasi cukup tinggi serta tanah tegal yang cukup luas, maka produksi pertanian yang utama adalah padi, jagung dan ketela rambat.

2.1. Kerjasama Kecamatan Sambungmacan (Kabupaten Sragen) – Kecamatan Mantingan (Kabupaten Ngawi)

Pola hubungan fungsional antara Kecamatan Sambungmacan (Sragen) dan Kecamatan Mantingan (Ngawi) secara fungsional terjadi hubungan fungsional dalam perdagangan. Para pedagang sayur menjual dagangannya ke Mantingan, dengan kata lain Mantingan merupakan pasar sayuran dari Sambungmacan. Sedangkan Sambungmacan merupakan pasar bagi pedagang sapi dari mantingan. Sebagian dari hasil pertanian dari Sambung macan di jual ke Ngawi.

Implikasi bentuk hubungan ini menjadikan kecamatan Sambungmacan merupakan titik tumbuh dari kecamatan perbatasan Sragen (Jateng) dan kecamatan Mantingan (Jatim) merupakan titik tumbuh dari kecamatan perbatasan Ngawi. Kedua kecamatan dapat dibentuk kerjasama suatu pembangunan wilayah, dengan pendekatan ini diharapkan wilayah perbatasan tersebut lebih cepat berkembang. Mengingat wilayah tersebut mempunyai potensi alam dan sosial ekonomi untuk berkembang, apabila

didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai. Banyak potensi sosial ekonomi yang ada di daerah mantingan(Ngawi) dan Sambungmacan (Sragen) yang dapat digarap bersama sehingga menjadi kekuatan wilayah yang bersangkutan. Mengingat pola penggunaan dengan luas lahan dari tanah sawah yang beririgasi teknis cukup luas, maka produksi pertanian yang utama adalah padi, jagung, kacang tanah, buah-buahan dan kelapa.

3. Kerjasama Antar Wilayah Berpotensi Terjadi Hubungan Fungsional

3.1. Kecamatan Gondang (Sragen) – Sine (Ngawi)

Antara Gondang dan Sine terjadi hubungan searah. Gondang merupakan pemasok tenaga kerja, terutama untuk perkebunan the di Sine, disamping itu Sine juga merupakan pasar bagi pedagang sayuran dari Gondang. Sebaliknya Sine tidak mempunyai akses terhadap aktivitas ekonomi terhadap Gondang.

Kecamatan Sine mempunyai lahan perkebunan karet seluas 908,89 Ha yang terdiri dari 10,92 Ha tanaman belum menghasilkan, 800,77 Ha tanaman muda dan 3,20 Ha tanaman tua dengan produksi 1.320,82 ton per tahun. Selain tanaman karet Sine juga menghasilkan tanaman utama lainnya yang potensial yakni teh. Luas lahan perkebunan karet di Sine 370,44 hektar dengan produksi 141,6 ton.

Tabel 3. Produksi tanaman perkebunan

Jenis	Luas (Ha)	Produksi (ton)
Teh	370,44	141,600
Kelapa	580,00	359,651
Kapok randu	398,00	59,300
Cengkeh	306,00	62,710
Jambu mete	1.137,00	1.190,000
Kopi	96,00	21,632
Karet	906,89	1.320,82

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perlu supply dari luar kecamatan, tentu dari kecamatan terdekat (Gondang) mengingat tenaga produktif yang ada di kecamatan Sine relative kecil/terbatas yaitu penduduk usia produktif (16 – 55 tahun) sebanyak 16.760 orang yang terdiri dari laki-laki 6.650 orang dan perempuan 10.110 orang.

3.2. Kecamatan Cepu (Blora) – Kecamatan Padangan (Bojonegoro)

Berdasarkan pengamatan di lapangan, maka hubungan ketergantungan antara Kecamatan Cepu dengan

Kecamatan Padangan terjadi dalam sektor perdagangan dan industry. Sebenarnya hubungan antara kedua kecamatan ini tidak mengarah pada hubungan fungsional tetapi hubungan ketergantungan. Para pedagang kecamatan Padangan menjual barang dagangannya ke pasar Cepu, demikian juga hasil-hasil industry dan kerajinan. Sebaliknya aktivitas ekonomi kecamatan Cepu tidak tertarik ke kecamatan Padangan.

Tingkat ketergantungan Padangan ke Cepu di sector perdagangan cukup kuat karena fasilitas pasar Cepu lebih unggul dibanding Padangan serta

didukung oleh lancarnya transportasi. Selain itu akses Padangan ke pusat ibu kota Bojonegoro relative jauh yakni kurang lebih 50 km, sehingga lebih tertarik ke Cepu yang jarak tempuhnya sangat dekat.

Barang-barang dagangan dari Padangan yang dijual ke Cepu meliputi hasil industry, hasil bumi, dan peternakan.

Implikasi bagi pembentukan hubungan fungsional wilayah. Potensi ekonomi kecamatan Cepu cukup baik khususnya untuk sektor perdagangan dan jasa. Potensi ini didukung dengan fasilitas yang cukup memadai, sehingga aktivitas ekonomi cukup dinamis, apalagi keberadaan blok cepu berpengaruh juga bagi dinamika pengembangan wilayah. Jarak kecamatan Cepu dengan Kabupaten Blora cukup jauh (kurang lebih 34 Km), sehingga akses Kabupaten Blora terhadap kecamatan Cepu tidak Nampak, perans ektor pertambangan cukup besar bagi perkembangan ekonomi Cepu.

Sementara itu kecamatan Padangan (Jatim) letaknya berhimpitan dengan kecamatan Cepu, fasilitas ekonomi di Kecamatan Pdangan relative terbatas. Letak kecamatan Padangan relative jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, oleh karena itu aktivitas ekonomi kecamatan Padangan tertarik ke kecamatan Cepu. Masyarakat kecamatan Padangan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menjual hasil pertanian dan industry ke pasar Cepu. Karena dekatnya jarak antara Cepu dan Padangan, mudahnya sarana transportasi dan komunikasi, maka secara ekonomis antara kecamatan Cepu dan kecamatan Padangan merupakan satu wilayah fungsional, Cepu berfungsi sebagai nodal sedangkan Padangan berfungsi sebagai pheri-pheri.

3.3. Kecamatan Sale, Rembang (Jateng) – Kecamatan Jatirogo Tuban (Jatim)
Interaksi aktivitas di dua kecamatan ini tidak berjalan seimbang, tetapi lebih condong tertarik ke Jatirogo.

Masyarakat Sale menjual produk-produknya dan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari ke Jatirogo, seperti hasil pertanian, mebel, hasil industry kecil, kapur putih, (Ke Surabaya). Kemudian mereka membeli kebutuhan sehari-hari seperti gula, terigu, perabot rumah tangga dan sebagainya. Tertariknya aktivitas ekonomi masyarakat Sale ke Jatirogo karea 1). masalah pasar, pasar di Kecamatan Sale semuanya pasar desa, yang terjadi hanyapada hari tertentu, satu kali dalam seminggu. Pada pasar desa komoditas yang ditransaksikan hanya terbatas produk-produk setempat. 2). Masalah transportasi, transportasi umum yang menghubungkan kecamatan Sale-Jatirogo relative terbatas 3). Produktivitas sector pertanian rendah. Rendahnya produktivitas ini karena sebagian besar sawah di kecamatan Sale adalah sawah tadah hujan (770 ha), sedangkan sawah irigasi teknis (550) ha) hanya ditanami padi terus menerus (tanpa pola tertentu), sehingga hasilnya kurang maksimal. Untuk itu dalam pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan 1) pembuatan pasar 2) meningkatkan sarana transportasi dan mengembangkan sector pertanian dengan pola tanam yang mengarah pada hortikultura yang didukung agroindustri.

4. Wilayah-wilayah yang tidak terjadi hubungan fungsional

Wilayah-wilayah yang tidak terjadi hubungan fungsional maupun berpotensi mempunyai hubungan fungsional meliputi:

4.1. Kecamatan Sarang, Rembang (Jateng) – Kecamatan Bulu , Tuban (Jatim)

4.2. Kecamatan Bulukerto Wonogiri (Jateng) – Kecamatan Poncol, Magetan (Jatim)

4.3. Kecamatan Kradenan, Blora (Jateng) – Kecamatan Ngraho, Bojonegoro (Jatim)

5. Wilayah-wilayah terabaikan

Kecamatan-kecamatan yang terabaikan dalam analisis ini karena tidak ada kemungkinan hubungan fungsional adalah: (1) Kecamatan Jepon (Blora), (2) Kecamatan Bogorejo (Blora) (3) Kecamatan Jiken (Blora) (4) Kecamatan Sambong (Blora) Kecamatan Kedungtuban (Blora) (6) Kecamatan Randublatung (Blora) Kecamatan Sambirejo (Sragen) Kecamatan Jenar (Sragen) (10 Kecamatan Paranggupito (Wonogiri) (11) Kecamatan Karangtengah (Wonogiri) (12) Kecamatan Kismantoro (Wonogiri) (13) Kecamatan Giriwoyo (Wonogiri) da Kecamatan Giritontro (Wonogiri)

B. Perilaku dan Motivasi Kerjasama

Pada banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia, pemerintah merupakan motor utama penggerak pembangunan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, kuatnya peran pemerintah pusat tidak dipungkiri. Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai fasilitator yang member arah bagi daerah, khususnya pemerintah kabupaten kota, dalam pembangunan secara umum. Sedangkan hasilnya akan sangat tergantung pada kemampuan kabupaten/kota merespon dan menyelenggarakan program-program pembangunan sesuai arahan pusat. Secara umum, seperti yang diungkap dalam bab sebelumnya, inisiator dan/atau pelaku kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral adalah: (1) pemerintah, khususnya pemerintah daerah, namun

tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat berperan sebagai inisiator atau salah satu pelaku (2) swasta; (3) masyarakat yang tergabung dalam asosiasi kelompok dengan kepentingan / misi tertentu.

C. Potensi

Faktor-faktor potensi dalam pelaksanaan dan pengembangan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan pihak swasta

Inisiatif dan keinginan mengembangkan suatu kawasan yang melibatkan Pemda beberapa daerah, dalam kasus pengembangan kawasan perbatasan RATUBNGNEGORO (blora Tuban, Rembang dan Bojonegoro) KARISMAWIROGO (

Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Gawi, Ponorogo), PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri, Wonosari) terutama potensi tambang minyak dan Gas di kawasan Blora – Bojonegoro pada Blok Cepu tentu memperyimbangkan berbagai aspek ekonomi, karena umumnya misi utama pihak swasta adalah keuntungan. Kondisi tidak hanya meringankan Pemda dalam membangun wilayahnya, karena kebutuhan financial relative teratasi, tetapi juga memotivasi Pemda untuk mengintegrasikan kegiatan ini dengan kegiatan lain yang menunjang. Melalui cetak biru pembangunan wilayah yang dirancang secara seksama diharapkan pemda dapat mengajak pihak swasta membangun wilayah dengan model kerjasama saling menguntungkan.

2. Kesadaran untuk saling Bekerjasama

Dalam kasus pengembangan PPawonsari, kedaratan kebutuhan untuk saling bekerjasama membuat tiga Pemda dari iga Kabupaten di tiga Provinsi sepakat menjalin kerjasama dalam koordinasi meningkatkan kerjasama selatan-selatan lintas tiga provinsi(Jatim,

Jateng, DIY). Pada awalnya kerjasama ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan tembus lintas tiga provinsi, melalui ruas Bayemharjo, Kecamatan Giritontro, onogiri (Jateng) – Tangkluk, Kecamatan Donorojo, Pacitan (Jatim) – dengan cara mengaspal hotmix dan pelebaran jalan.

Jalan ini diharap menjadi jalan provinsi dengan bantuan dana dari pusat. Kerjasama ini kemudian berkembang kepada : (1) peningkatan pelayanan bagi masyarakat – karena ketiga kabupaten mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, maka salah satu kesepakatan yang dibangun adalah upaya pemenuhan kebutuhan air; (2) pengembangan potensi sumber daya alam, kerjasama ekonomi mengembangkan kawasan wisata laut bertaraf internasional.

3. Inisiator Kerjasama Wilayah dan Sektoral

Dalam kasus kerjasama pengadaan air bersih inisiatif Pemda DIY, yang meliputi beberapa sector, untuk menjadikan kawasan pantai Baron dan Pantai Sadeng sebagai kawasan Wisata Alam dan, berkembang lebih luas dengan mengajak stakeholder lain bekerjasama. Ajakan ini mendapat respon positif dari lembaga non-pemerintah dan masyarakat di sekitar, sehingga proses mewujudkan kawasan wisata tersebut didukung banyak pihak. Masing-masing pihak membiayai sendiri aktivitas mereka, antara lain berupa penelitian, perencanaan pengelolaan dan penataan kawasan tersebut dan promosi.

4. Kendala

Selain berbagai potensi seperti tersebut di atas, masih banyak dijumpai kendala dalam meningkatkan kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral dalam merespon fenomena otonomi daerah. Faktor-faktor kendala pelaksanaan tersebut meliputi Perbedaan kepentingan

dan prioritas. Besarnya harapan terhadap pemerintah pusat. Masalah dana, beberapa inisiatif kerjasama daerah yang telah disepakati terputus atau tersendat pelaksanaannya, karena masalah dana. Belum adanya dokumen legalitas sebagai payung kerjasama

SIMPULAN

Berbagai hal penting yang dapat disimpulkan belajar dari sebuah kasus:

1. Diperlukan kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral. Hal ini didasarkan pada pokok persoalan yang berkembang seperti (a) isu sektoral, (b) eksternalitas daerah otonom (c) fungsi interdependen antar daerah dan (d) hirarki dari barang public
2. Dari pokok persoalan tersebut timbul berbagai respon, diantaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) monitoring perkembangan wilayah dan sektoral, (b) analisis kebutuhan kerjasama wilayah dan sektoral (c) mendorong intensitas sektoral tertentu pada wilayah tertentu (d) kerjasama antar daerah (e) koordinasi sektoral untuk keserasian antar daerah, dan (f) kerjasama antardaerah dengan stimulant sektoral;
3. Berbagai bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kerjasama antar wilayah dan sektoral , antara lain: (a) keterlibatan pihak swasta (b) kesadaran untuk saling bekerjasama (c) inisiator kerjasama wilayah dan sector (4) kendala pelaksanaan dan pengembangan kerjasama adalah (a) perbedaan kepentingan dan prioritas, (b) besarnya harapan terhadap pemerintah pusat, (c) kuatnya peran pemerintah pusat (d) masalah dana dan (e) dokumen legalitas sebagai payung kerjasama.

REKOMENDASI

Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk menopang efektifitas dan keberlanjutan kerjasama wilayah dan sektoral kabupaten/kota adalah:

1. Membentuk basis kerjasama yang kuat. Hal ini sesuai dengan paradigma membangun hubungan antar organisasi dalam bentuk *network and strategic alliances*. Sudah saatnya setiap organisasi atau institusi pemerintah mengembangkan hubungan luar yang kuat dengan organisasi lain agar mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam konteks memperkuat basis kerjasama antar pemerintah daerah ini, ada beberapa agenda praktis yang dapat dilakukan di masa mendatang.
2. Mengadakan monitoring terhadap potensi, kendala dan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah, untuk itu perlu disusun prosedur monitoring, hendaknya tidak bersifat komprehensif, karena hal ini memerlukan sumberdaya yang mahal. Sebaiknya adalah monitoring strategis, mengenal hirarki kepentingan, memfokuskan pada hal-hal penting tetapi tetap pada konteks kerjasama wilayah dan sektoral yang luas.
3. Membuat publikasi mengenai skema-skema potensi, kendala dan kerjasama sektoral dan wilayah secara empiris, akan lebih baik bila diklasifikasi. Publikasi ini dilakukan terus menerus untuk memperkuat kelompok sasaran dan meningkatkan pengetahuan mengenai kerjasama pembangunan sektoral dan wilayah itu sendiri.
4. Menyusun suatu bentuk desain training khusus oleh provinsi untuk memfasilitasi kerjasama antar

kabupaten/kota dalam wilayah *training* tersebut secara khusus diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis fasilitasi kerjasama atau kemitraan dengan basis yang kuat, disamping kemampuan-kemampuan praktis lainnya guna mengembangkan kapasitas sektoral dan wilayah. Pelatihan dapat diarahkan untuk identifikasi potensi konflik dan kerjasama sektoral dan wilayah. Materi tersebut diberikan dalam bentuk teori dan contoh-contoh nyata di wilayah Indonesia. Selain itu ada juga latihan simulasi untuk menangani kasus-kasus nyata yang dihadapi pada lingkungan/daerah peserta latihan.

5. Melakukan advokasi/pendampingan kasus-kasus kerjasama sektoral – wilayah baik dengan tenaga yang ada pada institusi dalam hal ini Badan Kerjasama Antar Daerah, maupun kerjasama dengan institusi lain dalam penyediaan tenaga yang dibutuhkan.
6. Memberi insentif untuk menumbuhkan pengembangan kapasitas maupun penanganan nyata kerjasama sektoral dan wilayah insentif ini bisa dalam bentuk paket dana alokasi khusus (DAK).
7. Melakukan penanganan kerjasama sektoral dan wilayah yang penting dan mendesak, dengan sumberdaya yang sebagian besar berasal dari pemerintah pusat, tetapi secara bertahap dialihkan kepada sector dan atau daerah
8. Memperbaiki institusi dalam arti luas, termasuk reorganisasi dan penyusunan yang mendapat mandate khusus untuk menangani kerjasama pembangunan sektoral dan wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baumol, Wj1977 Economic Theory and operation Analysis. Prentice Hall, Inc, New
- Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, 2003 Rencana Strategis
- Jersey lair, John P., 1991, Urban and Regional Economics ichard Irwin Inc. Boston
- Jeremiyas T Keban, Kerjasama antar Pemda dalam Era Otonomi Daerah;
- Jawa Tengah Dalam Angka
- Irsan, W 1962 Introduction to Regional Science, John Hopkins Press London
- Kameo, D dan P. Rietveld, “*Regional Income Disparities in Indonesia, a Comment*”, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. 35 No. 4, 1987, pp 451 – 459
- Kabupaten Ngawi Dalam Angka
- Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka
- Lincoln Arsyad, Ekonomi Perencanaan, BPFE Yogyakarta
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah